**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Analisis Situasi**

Agar perguruan tinggi tidak seperti menara gading, maka perlu memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah yang berada di sekitar lingkungan kampus. Apalagi perguruan tinggi juga dituntut untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yang salah satunya berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Disebabkan adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan tuntutan tri dharma perguruan tinggi, maka sebagian anggota sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan aktivitas pengabdian masyarakat secara individu, kelompok atau unit-unit. Hal ini dilaksanakan berkaitan dengan kepedulian setiap lembaga atau institusi yang bergerak dibidang Pendidikan (khususnya Pendidikan Tinggi) dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi (khususnya Indonesia).

Salah satu masalah yang terdapat di masyarakat adalah belum

terwujudnya akuntabilitas masjid. Dari survey yang dilakukan dosen akuntansi UIN Jakarta tahun lalu ke 112 masjid di Jabodetabek, terlihat masih sedikitnya masjid yang mempunyai laporan keuangan yang baik (Rini, 2015). Padahal seharunya sebagai bagian dari entitas publik, masjid harus mempertanggungjawabkan semua keuangannya kepada masyarakat, karena sumber keuangannya berasal dari sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik).

Masjid merupakan suatu entitas publik yang menjalankan aktivitas

baik yang bersifat spiritual maupun non spiritual. Zaman Rasullulah, masjid adalah pusat dari aktivitas ummat bukan hanya tempat melaksanakan ritual ibadah saja, tapi juga tempat pengembangan pendidikan informal. Tapi pada kenyataannya saat ini masjid berubah fungsi hanya pada tingkatan spiritual saja. Sangat di sadari bahwa masjid mempunyai tata kelola sendiri. Dengan adanya masjid mengelola dana

yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donator (masyarakat) dimana akuntabilitas dan transparansi adalah merupakan isu yang sangat penting. Selama ini masyarakat beropini bahwa managemen masjid hanya untuk para ustad saja, masjid tidak membutuhkan kemampuan lain selain dari pada membaca Alquran dan berzikir, masjid tidak membutuhkan akuntan (Anzar & Mukhtar, 2010).

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:

*“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.”*

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut di atas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktik akuntansi di lingkunganan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan praktiknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Booth (1993) menjelaskan bahwa, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Akuntansi pada dasarnya adalah *tools* yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktikkan.

Akuntansi dapat menjadi bagian dari pada peningkatan kualitas ummah dan bertransformasi untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi dapat membangun suatu model yang sesuai dengan kebutuhan masjid sehingga informasi yang dihasilkan dapat ditingkatkan kualitasnya, dan pengurus masjid dapat semakin menggerakkan aktivitas masjid.

Rendahnya kualitas pelaporan keuangan dan transparansi dalam manajemen masjid dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada manajemen masjid. Hal ini berdampak buruk pada keberlangsungan aktivitas masjid menjadi tidak stabil. Setelah melakukan observasi ke beberapa masjid yang ada di wilayah Jakarta, ditemukan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan masjid. Pertama, banyak masjid yang masih belum melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan masih dalam bentuk single entry bukan dalam bentuk double entry. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus masjid belum memahami pentingnya pencatatan akuntansi secara benar sehingga tidak mampu menyusun laporan keuangan masjid.

Kedua, catatan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan masjid belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat umum sebagai pihak yang berhubungan lansung dengan kegiatan masjid. Hal ini ditandai dengan belum adanya wadah yang mampu mengakomodir pengurus masjid untuk mempublikasikan laporan keuangan masjid, misalnya dipublikasikan melalui *website* masjid. Sebagai perbandingan masjid yang ada di Singapura telah menggunakan website sebagai wadah transparansi dan akuntabilitas terhadap publik dan ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1998 sampai saat ini. Hal ini sangat membantu salah dalam proses distribusi dana infak dan sadaqah yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan statistik pertumbuhan masjid yang ada di Indonesia

sangat besar yaitu berjumlah 643.834 pada tahun 2003, yang apabila di bandingkan dengan tahun 1957 hanya berjumlah 52,956. Sehingga pertambahan jumlah masjid yang signifikan harus di iringi dengan spirit untuk perubahan tata kelola manajemen masjid dan peningkatan pertanggungjawaban yang lebih baik. Sedangkan dari data Dewan Masjid Indonesia tahun 2015, di Jabodetabek terdapat jumlah masjid dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Wilayah | Jumlah |
| Jakarta Barat | 304 |
| Jakarta Pusat | 242 |
| Jakarta Selatan | 305 |
| Jakarta Timur | 213 |
| Jakarta Utara | 42 |
| Kota Tangerang | 187 |
| Kota Tangerang Selatan | 7\* |
| Kota Depok | 22 |
| Kota Bekasi | 7 |
| Kabupaten Bekasi | 4 |
| Kabupaten Bogor | 872 |
| Kota Bogor | 481 |
| Jumlah | 2.686 |

Sumber: Sistem Informasi Masjid, Kemenag RI

Dari hasil wawancara dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Ciputat Timur, di Kecamatan Ciputat Timur terdapat 68 masjid (musholla tidak dihitung). Pada pelatihan pengelolaan keuangan yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2016 yang lalu, sebagian besar pengurus mengeluhkan belum adanya keseragaman akun untuk pencatatan transaksi masjid, sehingga diperlukan software akuntansi masjid. Selain itu, para pengurus masjid meminta untuk dipandu secara detail dalam pembuatan laporan keuangan masjid, khususnya untuk mencatat transaksi keuangan masjid.

Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, maka kami

mengajukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembuatan software akuntansi masjid. Setelah ada software tersebut diberikan pelatihan pencatatan transaksi keuangan masjid.

Kegiatan tahun ini merupakan bagian (tahapan) pertama dari

kegiatan pengabdian masyarakat. Rangkaian program pengabdian

masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid, terlaksananya manajemen masjid modern yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pada akhirnya masjid juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Rincian rangkaian kegiatan program pengabdian masyarakat terkait masjid dapat dilihat pada bagian E*).

**B. Tujuan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus masjid dengan tujuan agar:

1. Terbentuknya sebuah software akuntansi masjid yang nantinya dapat

digunakan seluruh masjid di Indonesia.

2. Peserta mampu menyusun laporan keuangan masjid.

3. Peserta mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan pertanggung - jawaban keuangan masjid kepada publik.

**C. Hasil/Target**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya software akuntansi yang membantu pembuatan laporan keuangan masjid yang rapi, transparan, dan akuntabel.

**D. Sasaran**

Sasaran yang dipilih adalah para pengurus masjid. Masjid yang dipilih adalah masjid di wilayah Ciputat Timur. Mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa para pengurus itulah yang akan memegang pengelolaan keuangan di masjid dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dengan pelatihan yang akan diberikan, diharapkan dapat memberikan bekal dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan di masjid.

Pihak yang akan diberikan pelatihan pengelolaan keuangan masjid adalah semua pengurus masjid. Pelatihan pengelolaan keuangan masjid akan diberikan kepada 50 masjid di wilayah Ciputat Timur. Masjid yang dipilih adalah masjid yang pengelolaan keuangannya belum begitu baik setelah dilakukan survey. Masing-masing akan mengirimkan 2 orang pengurus untuk mengikuti pelatihan. Diperkirakan jumlah pengurus masjid yang akan mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan masjid ini

sebanyak +100 orang peserta.

**E. Tahapan**

Program pengabdian masyarakat ini dibagi dalam beberapa tahapan dan diharapkan nantinya menjadi program yang berkelanjutan. Program yang dibagi dalam beberapa tahapan ini dimaksudkan agar nantinya masjid bisa akuntabel dan transparan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahap | Tujuan | Program |
| 1 | Mempersiapkan software akuntansi masjid yang disesuaikan dengan pengetahuan masyarakat umum tentang pencatatan keuangan masjid | Pembuatan software |
| 2 | Memberikan pemahaman akuntansi masjid yang disesuaikan dengan catatan keuangan masjid umumnya serta pembuatan laporan keuangan masjid dengan menggunakan software pendukung melalui studi kasus. | FGD 1  a. Pelatihan dasar-dasar akuntansi masjid  b. Studi kasus transaksi  keuangan masjid dengan menggunakan software pendukung |
| 3 | Mendeteksi kendala-kendala yang ditemukan peserta secara langsung saat menggunakan software akuntansi masjid dalam menyelesaikan studi kasus | FGD 2  Evaluasi tahap 1 : Diskusi (menyelesaikan permasalahan yang ditemukan peserta) |

4 Memberikan feedback kepada peserta dalam bentuk penyelesaian laporan keuangan. Software diharapkan dapat diteruskan penggunaannya oleh peserta di masing-masing masjid yang

dikelola.

FGD 3

Evaluasi tahap 2 : Diskusi dan Launching Software Akuntansi Masjid

**F. Tujuan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus masjid dengan tujuan agar:

1. Peserta memahami akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan

masjid.

2. Peserta mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan pertanggung - jawaban keuangan masjid.

**G. Hasil/Target**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah laporan keuangan masjid yang rapi, transparan, dan akuntabel. Mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum sehingga terjadi akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan.

2. Laporan aktivitas, dan

3. Laporan arus kas.

Maka, target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

**Tabel 1**

**Target dan Indikator Hasil Pencapaian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator**  **Pencapaian** | **Target** | |
| 1 | Peserta memahami akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan masjid. | a. Tersusunnya laporan posisi keuangan | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |
| b. Tersusunnya laporan aktivitas | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |
| c. Tersusunnya laporan arus kas | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |

Target dan hasil pencapaian dalam tabel 1 di atas diharapkan akan berdampak pada penguatan atau pemberdayaan masyarakat muslim secara luas, karena pihak yang akan terlibat langsung dalam penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan adalah pengurus masjid, yang tidak lain adalah masyarakat muslim. Selain sebagai bentuk pengaplikasian QS. Al-Baqarah ayat 282, masjid dapat menjadi contoh bagi entitas nirlaba lainnya untuk dapat menerapkan akuntabilitas suatu entitas yaitu dengan mempublikasikan laporan keuangannya. Akuntansi merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas masjid dan dapat mempengaruhi ibadah yang dilakukan oleh masyarakat muslim di sekitar masjid.

Sejauh ini, masih sedikit sekali referensi mengenai praktik akuntansi

untuk masjid. Sehingga dibutuhkan pelatihan secara khusus tentang praktik akuntansi masjid, yaitu penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan masjid. Berdasarkan hal tersebut, hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini secara langsung berdampak pada pengembangan bidang keilmuan akuntansi.

**BAB II REVIEW TEORI**

**A. Akuntansi dan Teologi**

Kebanyakan ilmuan akuntansi mengikuti meanstream penelitian akuntansi yakni penelitian yang berbasis pada metode kuantitatif. Selain itu, pemahaman ilmuan akuntansi kebanyakan dibangun berdasarkan pondasi kaca mata kuda yakni akuntansi hanya bekerja sekitar organisasi laba atau organisasi nirlaba yang bebas dari pengaruh teologi maupun ideologi tertentu. Jacob (2004) mengutip Eliade (1959) menyatakan bahwa, “bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual”. Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual (Laughlin, 1990). Eliade (1959) menyatakan persepsi entitas keagamaan seperti Gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan di lembaga keagamaan.

Triyuwono (2000) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (complicated social interaction), namun mengutip Sombart dalam Triyuwono (2000), ia dapat juga dapat berbalik mempengaruhi lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Mathew dan Parera (1993) dalam Triyuwono (2000) menyatakan walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (*social constructed*) sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, namun ada pendekatan lain yang

melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial (*socially constructing*). Ini membuktikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik dan sangat sarat dengan nilai.

**B. Entitas Keagamaan dan Tata Kelola yang Baik**

Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*Good Governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*Trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai ”*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara (Mardiasmo, 2005). UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yang meliputi *participation, rule of Law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability,* dan *strategic Vision*.

**C. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (Mahmudi, 2005: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibiltas.

Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggung-

jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan.

Akuntanbilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan

akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lannya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Simanjuntak dan Januarsi (2011) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid. Penelitian ini dilakukan di masjid Baitusalam, Ketapang. Penelitiannya mencoba untuk memverifikasi dan menggambarkan praktik akuntansi di masjid. Secara umum, akuntansi merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas masjid dan dapat mempengaruhi ibadah yang dilakukan oleh masyarakat muslim di sekitar masjid. Namun, berbeda dengan yang ditemukan di masjid Baitusalam, yaitu transparansi dan akuntabilitas lebih menunjukkan kepada “riya”.

**D. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba**

Di dalam PSAK 45 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012), dijelaskan bahwa entitas nirlaba adalah entitas yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan

jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Basis akuntansi yang digunakan di dalam akuntansi entitas nirlaba akrual basis, yaitu transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau kas keluar. Adapun laporan keuangan yang harus dibuat adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, ditambah dengan catatan atas laporan keuangan.

**BAB III**

**METODE PELAKSANAAN**

**A. Sasaran Kegiatan**

Sasaran yang dipilih adalah para pengurus masjid. Masjid yang dipilih adalah masjid di sekitar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa para pengurus itulah yang akan memegang pengelolaan keuangan di masjid dan terkait dengan kegiatan- kegiatan yang dilakukan. Dengan pelatihan yang akan diberikan, diharapkan dapat memberikan bekal dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan di masjid.

Lebih lanjut, bekal dan pengetahuan yang diperoleh para pengurus

masjid diharapkan dapat diaplikasikan di masjid mereka masing-masing sehingga mampu mencipatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid, kemudian diharapkan dapat disampaikan ke masyarakat sekitarnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Berikut ini masjid yang akan dijadikan sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini:

1. Masjid Student Center

2. Masjid FISIP

3. Masjid Fathullah

4. Masjid Agung Al-Jihad Ciputat

5. Masjid Al-Muttaqin Kp. Utan

6. Masjid Al-Istiqomah

7. Masjid Jabalur Rahman Situ Gintung

8. Masjid Jami Arrahmah Rempoa

9. Masjid Baiturrahman

10. Masjid Nurul Huda Perumahan Taman Kedaung

**B. Metode Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah)

Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya akuntansi dan pengelolaan keuangan dalam setiap organisasi. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah selama 1,5 jam.

2. Langkah 2 (Metode Tutorial)

Peserta pelatihan diberikan materi tentang penyusunan laporan keuangan. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai dengan latihan/studi kasus. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.

3. Langkah 3 (Metode Diskusi)

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan masjid yang sudah mereka jalani ataupun hal-hal yang ingin mereka tanyakan untuk memulai pengelolaan keuangan masjid. Langkah ketiga diselenggarakan selama

1,5 jam.

Disamping langkah 1, 2, dan 3 di atas, akan dilakukan kegiatan pendampingan untuk menyusun laporan keuangan masjid selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta sasaran.

**C. Rancangan Evaluasi**

Kegiatan Pengabdian ini akan dievaluasi melalui kuesioner untuk mengetahui peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan masjid yang akan didistribusikan sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah pelatihan, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga dapat diketahui. Berikut ini tabel evaluasi program pengabdian ini.

**Tabel 2**

**Evaluasi Program Pengabdian pada Masyarakat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator**  **Pencapaian** | **Target** | |
| 1 | Peserta memahami akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan masjid. | a. Tersusunnya laporan posisi keuangan | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |
| b. Tersusunnya laporan aktivitas | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |
| c. Tersusunnya laporan arus kas | 1 laporan x  10 masjid | 1 laporan keuangan untuk 10 laporan |

**D. Proses Keberlanjutan**

Pelatihan ini akan menghasilkan 1 out put laporan keuangan yang akan dijadikan model atau contoh laporan keuangan masjid. Untuk selanjutnya setiap masjid diharapkan untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing berdasarkan pada model yang telah disusunkan.

**BAB IV ORGANISASI PELAKSANA**

Berikut ini akan dijelaskan mengenai organisasi pelaksana yang akan menjelaskan mengenai nama, kualifikasi, kompetensi, dan informasi tambahan lainnya yang dipandang perlu.

Nama dan gelar akademik : Dr. Rini, Ak, CA Bidang Keahlian : Akuntansi Syariah

Sertifikasi : Akuntansi Syariah (lulus level 2)

Nama dan gelar akademik : M. Sarudi Putra Siregar S.E Bidang Keahlian : Concept & Design Sertifikasi : Social Entreprise

Nama dan gelar akademik : Adinda Vindri Bidang Keahlian : Akuntansi

**BAB V**

**ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN**

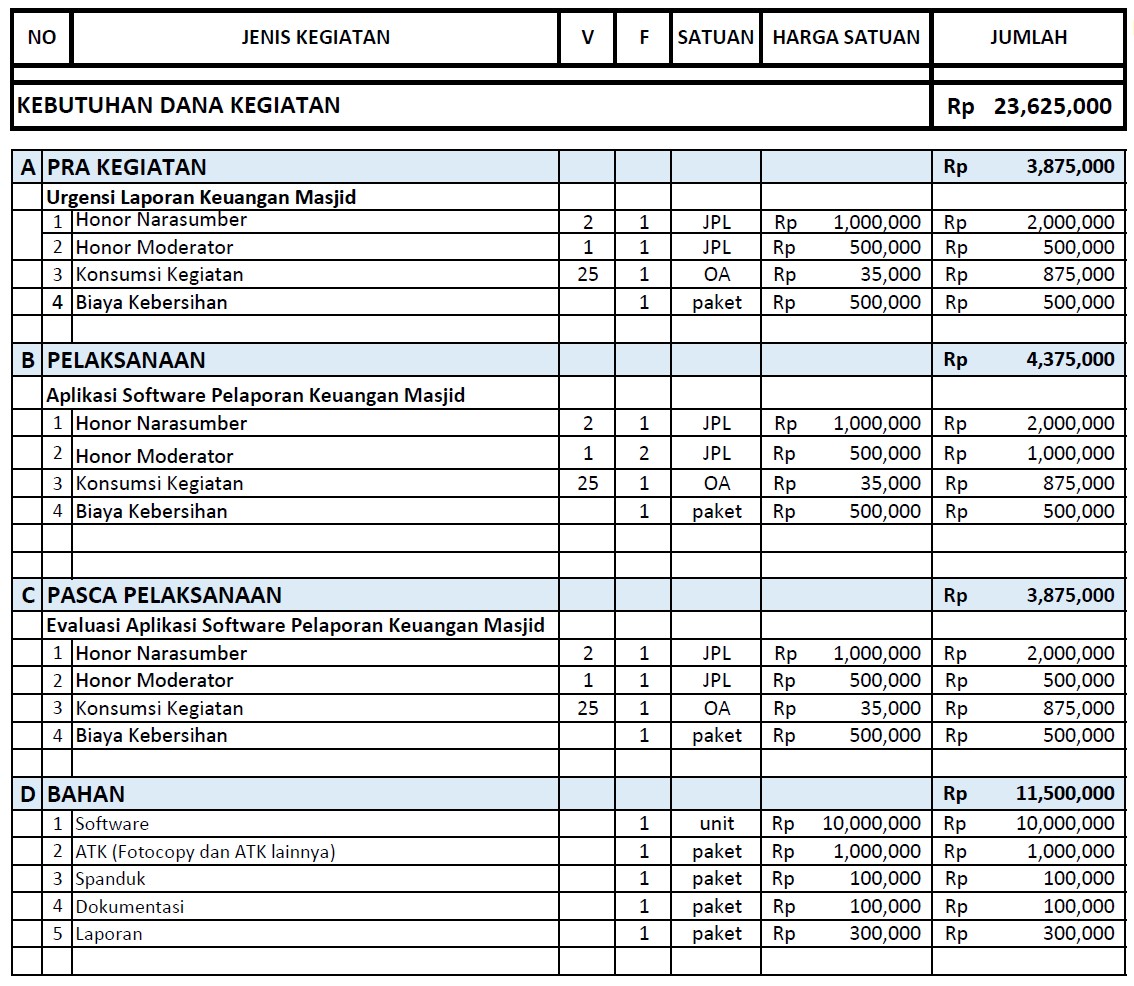
Berikut adalah rincian kebutuhan dana dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, beserta jadwal pelaksanaan kegiatan.

**A. Rincian Kebutuhan Dana**

**Tabel 3**

**Rincian Kebutuhan Dana**

**Pengabdian Masyarakat**



**B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

**Tabel 4**

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Mei** | **Juni** | **Juli** | **Agus** | **Sept** | **Okt** |
| Survey Lokasi | xx |  |  |  |  |  |
| Pembuatan software | xx | xx | xx | xx |  |  |
| Persiapan Pelaksanaan  Pengabdian Masyarakat |  |  |  | xx |  |  |
| Pelaksanaan Pengabdian  Masyarakat |  |  |  | xx | xx |  |
| Proses Keberlanjutan (Evaluasi Akhir Hasil dan Analisa Kegiatan ) |  |  |  |  |  | xx |
| Pelaporan Pengabdian  Masyarakat |  |  |  |  |  | xx |

**DAFTAR PUSTAKA**

Eliade, M. 1959. *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*, translated by

Task, W.R. Harcourt Brace, New York, NY.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.

Jacob, Kerry. 2004.*The Sacred and The Secular: Examining The Role of Accounting in The Religious Context*. Departemen of Accounting and Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia. Research Article.

Laughlin, R. 1990. *A model of financial accountability and the Church of England.*

Financial Accountability & Management, Vol. 6 No. 2, pp. 95-114. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Simanjuntak, Dahnil Anzar, dan Yeni Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.

Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah. LKiS*. Yogyakarta.